

ANALISA PENERAPAN PRINSIP GOOD COORPORATE GOVERNANCE (GCG) STUDI KASUS PADA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS BALIKPAPAN

Lukman^{1*}

Dosen Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Jalan Soekarno Hatta KM.9 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan¹

E-mail: ondhe290@yahoo.com

ABSTRACT

Good Corporate Governance (World Bank) (Tangkilisan; 2003) is a collection of laws, regulations and rules that must be fulfilled that can encourage the performance of company resources to work efficiently, resulting in long-term sustainable economic value for shareholders and the surrounding community. overall. Then according to Zarkashi (2008). Good Corporate Governance (GCG) is a structure used by stakeholders, shareholders, commissioners and managers to formulate company goals and means to achieve company goals, as well as a means to achieve these goals and monitor performance. There are five principles for Good Corporate Governance in Indonesia: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. content analysis, which is a method of collecting research data through observation and analysis techniques of the content or message of a document (including: advertisements, reports, employment contracts, journals, magazines, or newspapers. The purpose of content analysis is to identify the characteristics or specific information contained in a document to produce an objective and systematic description (Bambang, 1999).

Keywords: good corporate governance, content analysis, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.

ABSTRAK

Good Corporate Governance (World Bank) (Tangkilisan; 2003) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Kemudian menurut Zarkashi (2008). Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur yang oleh Stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Good Corporate Governance Indonesia terdapat lima prinsip: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). *content analysis*, yang merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa: iklan, laporan, kontrak kerja, jurnal, majalah, atau surat kabar. Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi

spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis. (Bambang,1999)

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Conten Analysis, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.*

PENDAHULUAN

Istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer dan ditempatkan pada posisi terhormat. Dikarenakan alasan yang pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Alasan kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG). Para pelaku dunia usaha dituntut untuk mengubah cara mereka melakukan dan mengelola bisnis mereka. Ditambah lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan semakin kompetitif, maka perubahan fundamental dalam penerapan corporate governance mutlak dilakukan. (Herwidayatmo, 2000).

Pada bulan November tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum good corporate governance tahun 2006.

Dewasa ini dengan semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi di Indonesia memacu pengelola perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan konsumen memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh untuk sejumlah uang yang dibayarkan. Perbandingan nilai tambah yang diperoleh (kualitas pendidikan yang baik) untuk sejumlah uang yang dibayarkan menjadi perhatian yang serius dengan meningkatnya biaya pendidikan (Fram, dkk, 1995)

Peningkatan kualitas merupakan salah satu strategi bisnis yang ditekankan pada pemenuhan keinginan konsumen. Di sisi lain, kinerja perusahaan dan kepuasan konsumen merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Kinerja berpengaruh langsung terhadap

kepuasan konsumen. Oleh karena itu, suatu unit bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, dimulai dengan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen.

Perguruan Tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian ke masyarakat. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. (Soeasminah, 1992)

Salah satu Badan penjamin kualitas dan jaminan mutu yang telah berdiri dan sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional dan PP No. 60 tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

Untuk mencapai keberhasilan yang kompetitif sesuai rekomendasi dari BAN serta agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai maka perlu melakukan perencanaan strategi serta pengelolaan yang baik terhadap keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan?”. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah “ penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Menurut Sekaran (2006), “Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini.” Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999) studi kasus adalah “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.”

Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan Laporan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta STT Migas Balikpapan, Alasannya, STT Migas Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang baru sudah mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kalimantan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, dari rujukan teoritis yang relevan dengan membaca beberapa buku, majalah, buletin, surat kabar serta internet.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 2006. Pada pedoman ini menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi STT Migas Balikpapan, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Dengan mengacu pada pedoman ini, maka STT Migas Balikpapan dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar untuk mengevaluasi dan menerapkan tata kelola sekolah yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang baik bagi Sekolah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

Kemudian menggunakan content analysis, yang merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa: iklan, laporan, kontrak kerja, jurnal, majalah, atau surat kabar). Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis. (Bambang,1999)

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif yaitu mengetahui bagaimanakah penerapan good corporate governance yang telah dilakukan STT Migas Balikpapan. Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu:

1. Mengumpulkan data mengenai penerapan GCG STT Migas Balikpapan terutama pada Laporan Tata Kelola sekolah.
2. Memproses data yang didapat melalui pencatatan, pengetikan dan pengklasifikasian.
3. Data diklasifikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip CGC.
4. Menganalisa hasil pengklasifikasian dengan pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006.
5. Menyimpulkan bagaimanakah penerapan GCG pada STT Migas Balikpapan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk mendeskripsi pemecahan masalah penelitian dan menguji hipotesis. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisa Penerapan Prinsip STT Migas Balikpapan****Checklist Penerapan Prinsip GCG STT MIGAS BALIKPAPAN**

PRINSIP GCG	PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA	PENERAPAN			ANALISA
		PRINSIP GCG STT MIGAS			PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKAN PEDOMAN
		2012	2013	2014	
KETERBUKAAN	Informasi disediakan:				
	a. Tepat Waktu	√	√	√	
	b. Memadai	√	√	√	
	c. Jelas	√	√	√	
	d. Akurat & Dapat Diperbandingkan	√	√	√	
	e. Mudah Diakses	√	√	√	
	Menyediakan Informasi:				
	a. Visi	√	√	√	
	b. Misi	√	√	√	
	c. Sasaran Usaha	√	√	√	
	d. Strategi Sekolah	√	√	√	
	e. Kondisi Keuangan	√	√	√	
	f. Susunan dan Kompensasi Pengurus	√	√	√	
	g. Pemegang Saham Pengendali				
	h. Kepemilikan Saham oleh Anggota pengurus dan Pembina	√	√	√	
	i. Sistem Manajemen				

Resiko	√	√	√
j. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	√	√	√
k. Sistem Pelaksanaan GCG dan Tingkat Kepatuhan	√	√	√
l. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Kondisi sekolah			
Tidak Mengurangi Kewajiban Untuk Memenuhi Ketentuan Kerahasiaan Kerusahaan Sesuai Dengan:			
a. Peraturan Perundang-undangan	√	√	√
b. Rahasia Jabatan	√	√	√
c. Hak-hak Pribadi	√	√	√
a. Kebijakan sekolah Harus Tertulis	√	√	√
b. Secara Proporsional dikomunikasikan Kepada Pemangku Kepentingan			

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi sekolah, sekolah harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan,

maka STT MIGAS Balikpapan telah melaksanakannya setiap tahunnya dengan menyediakan akses kepada *stakeholders* untuk mengakses hasil kegiatan perkuliahan.

Hasil Analisa Penerapan Prinsip Akuntabilitas STT Migas Balikpapan

Checklist Penerapan Prinsip STT MIGAS BALIKPAPAN

PRINSIP GCG	PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA	PENERAPAN			ANALISA
		PRINSIP GCG			PENERAPAN
		<u>STT MIGAS</u>			PRINSIP GCG
		2012	2013	2014	BERDASARKAN PEDOMAN
AKUNTABILITAS	a. Menetapkan Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Organ Sekolah	√	√	√	
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Semua Karyawan Secara Jelas dan Selaras Dengan Visi, Misi, Nilai- nilai Sekolah (<i>corporate values</i>), dan Strategi Sekolah	√	√	√	
	c. Meyakini Bahwa Semua Organ Sekolah dan Semua Karyawan Mempunyai Kemampuan Sesuai dengan Tugas, Tanggung jawab, dan Perannya Dalam Pelaksanaan GCG	√	√	√	
	d. Memastikan Adanya				

Sistem Pengendalian Internal yang Efektif	√	√	√
e. Memiliki Ukuran Kinerja Untuk Semua Jajaran Sekolah yang Konsisten Dengan Sasaran Sekolah			
f. Memiliki Sistem Penghargaan dan Sanksi (<i>reward and punishment system</i>)	√	√	√
g. Setiap Organ Sekolah dan Semua Karyawan Harus Berpegang pada Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku (<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati.	√	√	√

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006

Mengacu pada pedoman diatas mengenai akuntabilitas pada STT MIGAS Balikpapan diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi sekolah. Tugas dan wewenang masing-masing organisasi telah dibuat dan dipaparkan setiap tahunnya oleh STT Migas Balikpapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah.

Hasil Analisa Penerapan Prinsip Tanggung Jawab STT Migas Balikpapan

Checklist Penerapan Prinsip GCG STT MIGAS BALIKPAPAN

PRINSIP GCG	PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA	PENERAPAN			ANALISA PENERAPAN
		PRINSIP GCG STT			PRINSIP GCG
		<u>L</u>	<u>MIGAS</u>	<u></u>	BERDASARKAN
		2012	2013	2014	PEDOMAN
TANGGUNG JAWAB	a. Berpegang Pada Prinsip Kehati-hatian b.	√	√	√	
	Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Sekolah	√	√	√	
	c. Peduli Terhadap Masyarakat	√	√	√	
	d. Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan di Sekitar Sekolah	√	√	√	
	e. Membuat Perencanaan dan Pelaksanaan Yang Memadai	√	√	√	

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006

Tanggung jawab atas komitmen manajemen, STT Migas Balikpapan telah melakukan rapat antara Dewan Pengurus Yayasan dan Pimpinan Sekolah setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Sekolah.

Hasil Analisa Penerapan Prinsip Independensi STT Migas Balikpapan

Checklist Penerapan Prinsip GCG STT MIGAS Balikpapan

		PENERAPAN			ANALISA
PEDOMAN UMUM		PRINSIP GCG STT			PENERAPAN PRINSIP
PRINSIP GCG	PRINSIP GCG	MIGAS			GCG BERDASARKAN
	INDONESIA	2012	2013	2014	PEDOMAN
INDEPENDENSI	a. Menghindari Terjadinya Dominasi Oleh Pihak Manapun	√	√	√	
	b. Tidak Terpengaruh Oleh Kepentingan Tertentu	√	√	√	
	c. Bebas dari Benturan Kepentingan (<i>conflict of interest</i>)	√	√	√	
	d. Bebas dari Segala Pengaruh atau Tekanan	√	√	√	
	e. Melaksanakan Fungsi dan Tugasnya Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang- undangan	√	√	√	
	f. Tidak Saling Mendominasi dan atau Melempar Tanggung Jawab Antara Satu dengan	√	√	√	

Yang Lain

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006

Dalam rangka penerapan GCG sekolah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan sekolah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. STT Migas Balikpapan telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik.

Hasil Analisa Penerapan Prinsip Kewajaran STT Migas Balikpapan

Checklist Penerapan Prinsip GCG STT Migas Balikpapan

PRINSIP GCG	PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA	PENERAPAN			ANALISA
		PRINSIP GCG STT MIGAS			PENERAPAN PRINSIP GCG
		2012	2013	2014	BERDASARKA N PEDOMAN
KEWAJARAN	a. Memberikan Kesempatan Kepada Pemangku Kepentingan Untuk Memberikan Masukan dan Menyampaikan Pendapat Bagi Kepentingan Sekolah	√	√	√	
	b. Membuka Akses Terhadap Informasi Sesuai dengan Prinsip Transparansi dalam Lingkup Kedudukan Masing-masing	√	√	√	
	c. Memberikan Perlakuan yang Setara dan Wajar	√	√	√	

Kepada Pemangku			
Kepentingan			
d. Memberikan			
Kesempatan			
yang Sama Dalam			
Penerimaan Karyawan	√	√	√
e. Melaksanakan			
Tugasnya			
Secara Profesional Tanpa			
Membedakan Suku,			
Agama, Ras, Golongan,			
Gender, dan Kondisi			
Fisik.			

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006

Berdasarkan pedoman diatas STT Migas Balikpapan Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas STT Migas Balikpapan melakukan fungsi audit baik internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, STT MIGAS menerapkan lima prinsip GCG sebagai berikut:

Keterbukaan (*Transparency*)

STT Migas telah menerapkan prinsip keterbukaan dengan baik. STT Migas menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahaan dijelaskan secara terinci oleh STT Migas Balikpapan setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi STT Migas Balikpapan. Informasi tersebut mengenai visi-misi, sasaran usaha, strategi sekolah, laporan pelaksanaan good corporate governance, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam sekolah dan sekolah

lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability pada STT Migas Balikpapan diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan job description-nya. STT Migas menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menghilangkan perangkapan tugas dan jabatan. Kemudian STT Migas Balikpapan memberikan informasi serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan perekrutan karyawan di bidang tertentu, serta bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan. Sehingga dalam hal kompetensi organisasi, karyawan sudah berkompetensi dalam bidangnya masing-masing. Begitu juga mengenai pengendalian sekolah, STT Migas Balikpapan menerapkan Sistem pengawasan Internal dan Jaminan Mutu yang. Untuk mengaplikasikan akuntabilitasnya reward dan punishment system, STT Migas Balikpapan memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan STT Migas Balikpapan, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab atas komitmen manajemen, STT Migas Balikpapan telah melakukan rapat antara Pengurus Yayasan dengan Pimpinan Sekolah, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Sekolah. Dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, STT Migas Balikpapan dalam telah melaporkannya dengan cukup baik.

Independensi (*Independency*)

STT Migas Balikpapan telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. STT Migas Balikpapan juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat

dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Pengurus yayasan dan Pimpinan Sekolah.

Kewajaran (*Fairness*)

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit internal dan eksternal yang dipergunakan untuk kepentingan pengurus yayasan dan pimpinan sekolah. Kesimpulan ditulis dengan menggunakan paragraph dan ditulis sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Dalam kesimpulan dijelaskan bagaimana hasil penelitian ini berjalan, sesuai dengan hipotesa atau sebaliknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada orang-orang yang telah membantu dalam penelitian ini dan juga diucapkan terima kasih kepada lembaga yang telah membiaya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Mas Ahmad, 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta Pusat: Ray Indonesia.
- Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia. (Online), ([http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX- Oktober-2000.PDF](http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Okttober-2000.PDF), diakses pada tanggal 20 Mei 2012).
- Indrianto, Langgeng. 2005. Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN (Studi Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan Kediri).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Aditya, 2009, "Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)"

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publications Service. France: 9-19.
- Suprayitno, G. (et al.). 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance. Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co.
- Triana, Yeni. 2003. Penerapan Good Corporate Governance Dalam rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. "WBCSD's first report- Corporate Social Responsibility". Geneva.
- Zarkashi, M. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Penerbit Alfabeta.